



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 42 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun komitmen bersama dalam menerapkan sistem kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
  - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu mengatur pedoman pengelolaan risiko;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
7. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
8. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
9. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
10. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
11. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

12. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Risiko.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO

#### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintahan Daerah;
  - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan budaya sadar risiko;
- b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
- c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

#### Bagian Kedua

##### Pengembangan Budaya Sadar Risiko

## Pasal 5

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
  - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
  - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
  - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
  - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

### Bagian Ketiga

#### Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

##### Pasal 6

- (1) Pembentukan struktur pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dalam rangka optimalisasi penerapan pengelolaan risiko.
- (2) Struktur pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
  - c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR; dan
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan;
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

- (3) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (6) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (7) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) terdiri atas:
  - a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. UPR tingkat eselon II; dan
  - c. UPR tingkat eselon III dan eselon IV.
- (2) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

- (3) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat eselon II pada Perangkat Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (4) UPR tingkat eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memiliki tugas:
  - a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan penanganan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
  - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk komite pengelolaan Risiko.
- (2) Keanggotaan komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai ketua;
  - b. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (3) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
    1. sosialisasi;
    2. bimbingan;
    3. supervisi; dan
    4. pelatihan pengelolaan risiko.

- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
  - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

#### Paragraf 2

#### Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

#### Pasal 10

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintahan Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

### Paragraf 3

#### Penilaian Risiko

##### Pasal 11

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra SKPD atau segera setelah diselesaikannya Renstra SKPD.
- (5) Penilai risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA SKPD atau segera setelah diselesaikannya RKA SKPD.
- (6) Format Penilaian Risiko sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 12

Proses penilaian risiko meliputi:

- a. penetapan konteks/tujuan;
- b. Identifikasi risiko; dan
- c. Analisis Risiko.

### Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari tahap:

- a. penetapan konteks/tujuan; dan
- b. penetapan kriteria risiko.

### Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:
  - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
  - b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
  - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra SKPD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA satuan kerja Perangkat Daerah.

### Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. skala dampak risiko;
  - b. skala kemungkinan risiko; dan
  - c. skala tingkat risiko.

- (3) Ketentuan mengenai ilustrasi dan penentuan kriteria penilaian Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

#### Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
  - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar risiko.

#### Pasal 17

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
  - b. memvalidasi risiko;
  - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf 4  
Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP).
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5  
Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 6  
Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya secara berjenjang mulai dari:
  - a. Bupati;
  - b. Kepala Perangkat Daerah atau pejabat struktural eselon II;
  - c. pejabat struktural eselon III meliputi: kepala bagian/kepala bidang; dan
  - d. pejabat struktural eselon IV meliputi: kepala seksi, dan kepala subbagian.
- (4) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

### BAB III PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
  - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
  - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan.

#### Pasal 22

- (1) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari:
  - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
  - c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.

- (2) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. dokumen penilaian risiko; atau
  - b. dokumen rencana tindak pengendalian.

#### Pasal 23

- (1) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (2) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah;
  - b. untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

#### Pasal 24

- (1) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 42

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**SLAMET SETIONO, SH, MM**  
NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 42 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blora.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Blora dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinaei Sekretariat Daerah.

## 2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko- risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis satuan kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

## 3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Eselon III dan IV.

## B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko dilingkup pemerintah yang telah diidentifikasi sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (*Probabilitas*) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

### 1. Skala Dampak Risiko

*(Agar diuraikan skala dampak risiko yang digunakan oleh Pemda)*

### 2. Skala Probabilitas

*(Agar diuraikan skala probabilitas risiko yang digunakan oleh Pemda)*

### 3. Skala Nilai Risiko

*(Agar diuraikan skala nilai risiko yang digunakan oleh Pemda)*

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

NO	WAKTU	TAHAPAN MANAJEMEN PEMDA	TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO	PELAKSANA	OUTPUT TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO
1	Proses penyusunan RPJMD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan</li> <li>Penyusunan Risiko Strategis Pemda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komite pengelolaan risiko</li> <li>Sekda selaku Koordinator</li> <li>UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah)</li> </ul>	<p>Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko % Tahunan</p> <p>Daftar Risiko dan RTP Strategi Pemda</p>
2	Proses penyusunan Renstra OPD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komite pengelolaan risiko</li> <li>Sekda selaku Koordinator</li> <li>UPR Tingkat Es.1/Es.2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid)</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3	Januari-Mei Tahun n	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-September Tahun n	Penyusunan RKA SKPD (Penetapan rencana sasaran pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Perangkat Daerah</li> <li>Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 Perangkat Daerah</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5	Oktober Tahun n	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengomunikasian Risiko dan RTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Perangkat Daerah</li> <li>Komite Pengelolaan Risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan RTP</li> <li>KSOP</li> </ul>
6	November-Desember Tahun n	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan atau Revisi KSOP</li> <li>Pengomunikasian perubahan KSOP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3 dan 4</li> <li>Sekda selaku koordinator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notulen pengomunikasian</li> <li>Finalisasi daftar risiko dan RTP</li> </ul>
7	Januari-Desember Tahun n	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3 dan 4</li> </ul>	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komite Pengelolaan Risiko</li> </ul>	Bukti pelaksanaan KSOP

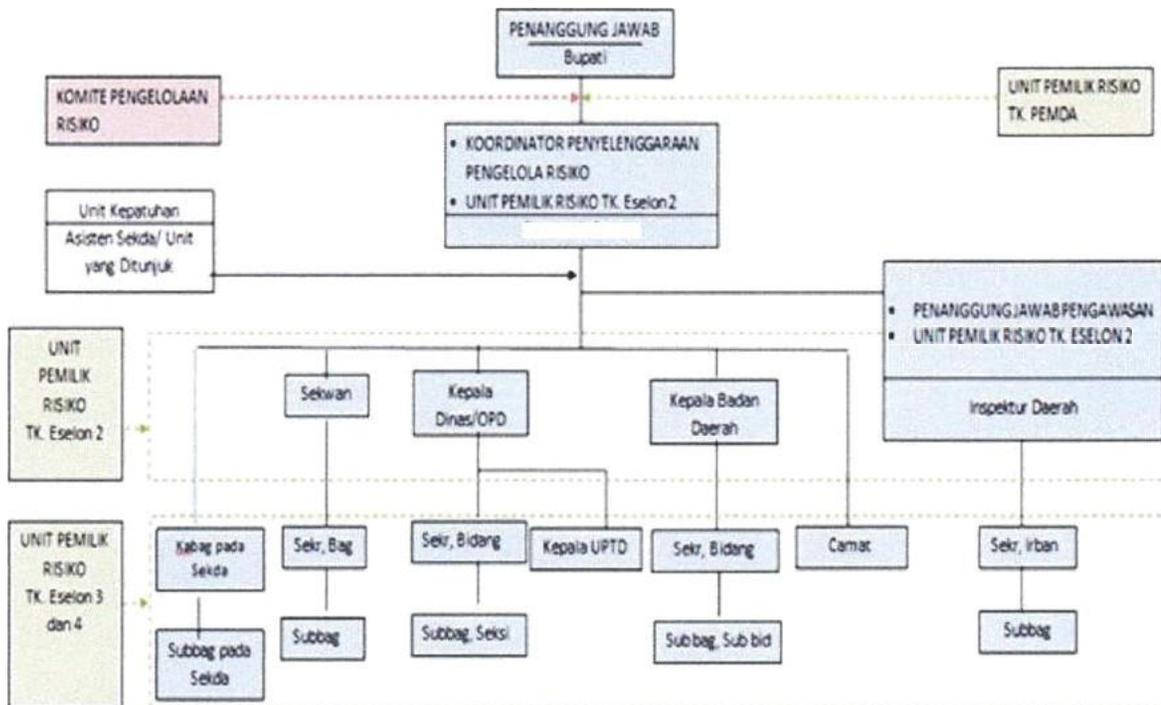
NO	WAKTU	TAHAPAN MANAJEMEN PEMDA	TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO	PELAKSANA	OUTPUT TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Perangkat Daerah</li> <li>• Pelaksana Program dan kegiatan</li> </ul>	
	Berkala (Triwulan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4</li> <li>• Unit Kepatuhan</li> <li>• Sekda selaku koordinator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Form Monitoring Risiko</li> <li>• Form Monitoring TL RTP</li> </ul>
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notulen rapat</li> <li>• Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)</li> </ul>
	Juni-Juli Tahun n	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda  Catatan: Rsisiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPR Pemda (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah)</li> <li>• Sekda selaku Koordinator</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September n	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran perkegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah  Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bupati</li> <li>• Sekda selaku Koordinator</li> <li>• Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid)</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
8	Juanauri-Februari n	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bupati</li> <li>• Kepala Perangkat Daerah UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4</li> <li>• Unit Kepatuhan</li> <li>• Sekda selaku koordinator</li> </ul>	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 2022
9	Februari-Maret Tahun n	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat</li> </ul>	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian maturitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bupati</li> <li>• Kepala Perangkat Daerah</li> <li>• Inspektorat</li> </ul>	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

### III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN

#### A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah  
Kabupaten Blora



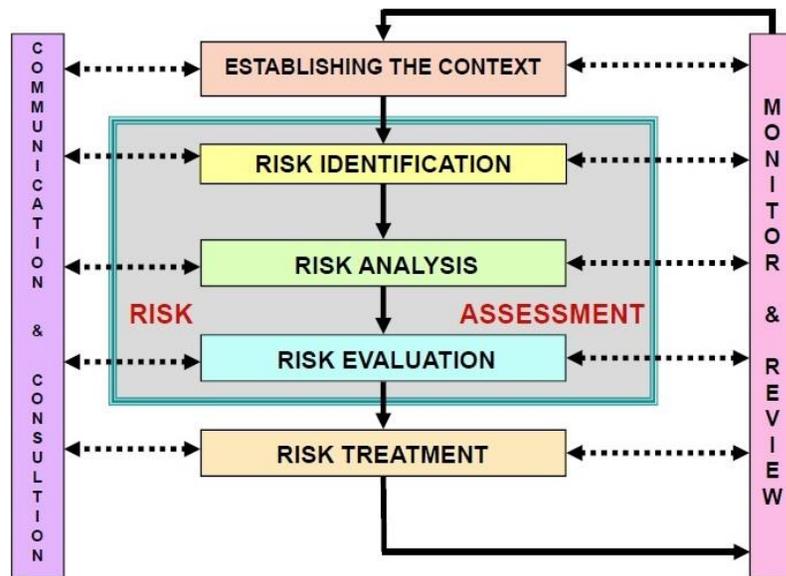
Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

*(Agar dijelaskan pihak yang mengisi posisi pengelolaan risiko dan tanggung jawab/wewenangnya)*

1. Penanggung jawab;
2. Koordinator penyelenggaraan;
3. Unit pemilik risiko;
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda
5. Unit kepatuhan; dan
6. Penanggungjawab pengawasan.

#### B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dengan tahapan sebagai berikut:



*Diadaptasi dari AS/NZS: 2004*

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut: *(Agar dijelaskan rincian dan langkah-langkah setiap tahapan, form-form yang digunakan)*

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
  - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui revidi dokumen;
  - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (*CEE*); dan
  - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
  - a. Penetapan Konteks/Tujuan
    - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
    - 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan
      - a) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
      - b) menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
  - b. Identifikasi Risiko
  - c. Analisis Risiko
    - 1) melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
    - 2) memvalidasi risiko;
    - 3) melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;

- 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
  - a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
  - c) menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
  - d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
  - e) menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
3. Kegiatan Pengendalian
  - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
  - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi
 

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.
5. Pemantauan
  - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
  - b. Pemantauan kejadian risiko.

#### IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

##### A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

*(Agar dijelaskan kapan, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan)*

##### B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko

*(Agar dijelaskan kapan, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan)*

##### C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan

*(Agar dijelaskan kapan, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan)*

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

FORMAT PENILAIAN RISIKO

PENILAIAN RISIKO PROGRAM TAHUN ...

PERANGKAT DAERAH: .....

NO	PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	KODE RISIKO	RISIKO	SEBAB	UC/C	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG ADA					K	D	TINGKAT RISIKO (TR)	PERINGKAT RISIKO (PR)	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	PEMILIK RISIKO	
								URAIAN	DESAIN		EFEKTIFITAS								
									A	T	TE	KE							E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BLORA  
 NOMOR 42 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

ILUSTRASI KRITERIA PENILAIAN RISIKO

1. Dalam skala 4, kategori nilai risiko dan operasionalnya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Matrik Analisis Risiko			DAMPAK/KONSEKUENSI			
			TIDAK SIGNIFIKAN	KECIL	BESAR	SANGAT SIGNIFIKAN
			1	2	3	4
KEMUNGKINAN TERJADI RISIKO	HAMPIR PASTI	4				
	KEMUNGKINAN BESAR	3				
	KEMUNGKINAN KECIL	2				
	SANGAT JARANG	1				

PENJELASAN:

WARNA	KETERANGAN	SKOR
	Sangat Rendah	1-2
	Rendah	3-4
	Tinggi	6-9
	Sangat Tinggi	12-16

2. Rumus Perolehan Skor:

$\text{Skor} = \text{Kemungkinan Terjadinya Risiko} \times \text{Dampak/Konsekuensi}$
---

BUPATI BLORA,  
 Cap Ttd.  
 ARIEF ROHMAN